

ANALISIS KENDALA GURU DI SDN GUNUNG GATEP KAB. LOMBOK TENGAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Heri Setiawan¹, Itsna Oktaviyanti², Ilham S. Jiwandono³, Lalu H. Affandi⁴,
Ida Ermiana⁵, Baiq N. Khair⁶

Universitas Mataram

heri_setiawan@unram.ac.id, itsna@unram.ac.id, ilham_jiwandono@unram.ac.id
hamdian.fkip@unram.ac.id, idaermiana@yahoo.com,
baiqniswatul_fkip@unram.ac.id

ABSTRAK

Seluruh lapisan warga warga Indonesia tanpa memandang perbedaan termasuk yang memiliki perbedaan psikis, fisik, emosi, intelektual, mental, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Implementasi pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak dengan kesulitan fungsional/penyandang disabilitas. Implementasi pendidikan inklusif di sekolah perlu adanya integrasi dan saling-keterdukungan antar seluruh komponen dan berbagai pihak baik sekolah, guru, siswa, orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kendala dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif khususnya di SDN Gunung Gatep, Kab. Lombok Tengah, NTB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi, interview, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti tahapan: (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3) presentasi data, dan (5) menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami guru di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah. Adapun beberapa kendala yang dapat ditemukan yaitu: (1) kendala dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal siswa dengan kesulitan fungsional; (2) kendala dalam merencanakan pembelajaran inklusif; (3) kendala dalam melaksanakan pembelajaran inklusif di kelas; dan (4) kendala dalam melaksanakan evaluasi dan penentuan tingkat pencapaian siswa.

Katakunci : kendala guru, pendidikan inklusif, sekolah dasar

ABSTRACT

All layers of Indonesian citizens without regard to differences including those who have a difference in psychic, physical, emotional, intellectual, mental, entitled to a quality education. The implementation of inclusive education is one of the strategies for providing education access to all children, including children with disability. The implementation of inclusive education in schools needs integration and mutual support among all components and various parties of schools, teachers, students, parents, society and government, so that the inclusion education can run well. The purpose of this research is to analyse obstacles in implementing inclusive education, especially at SDN Gunung Gatep, Kab.Lombok Tengah, NTB. This research uses qualitative research methods. Data collection is carried out with observation techniques, interviews, and documentation studies. Data analysis follows the stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, and (5) draw conclusions. The results of this research show that there are several obstacles experienced by the teacher at SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah. There are several obstacles that can be found, namely: (1) conducting the identification and initial assessment of disability students; (2) planning inclusive learning; (3) conducting inclusive learning in class; and (4) conducting evaluation and determination of the level of achievement of students.

Keywords: Teacher constraints, inclusive education, elementary school.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Seluruh lapisan warga Indonesia tanpa memandang perbedaan termasuk yang memiliki perbedaan psikis, fisik, emosi, intelektual, mental, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta berkewajiban menyediakan akses pendidikan kepada semua anak termasuk anak dengan kesulitan fungsional/ berkebutuhan khusus.

Implementasi pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak dengan kesulitan fungsional/ penyandang disabilitas. Implementasi pendidikan inklusif diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa semua siswa dengan kesulitan fungsional/ disabilitas berhak memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenjang, jenis, jalur pendidikan secara inklusif maupun khusus. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan inklusif menempatkan seluruh *stakeholder* secara bersama-sama

mengembangkan dan mengupayakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak tanpa terkecuali.

Implementasi pendidikan inklusif juga dimaklumkan dalam UU No. 70 tahun 2009. Dalam pasal 4 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap pemerintah kabupaten/ kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima siswa. Hal ini tentu menandakan bahwa, semua pemerintah daerah tanpa terkecuali seharusnya memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkup wilayahnya. Baik dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana maupun peenyiapan sumberdaya yang memadai.

Adanya sekolah inklusi bertujuan agar semua siswa berkesempatan untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui program pendidikan yang ramah terhadap semua siswa dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Pendidikan inklusif merupakan program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan usianya dan perkembangannya (Schmidt dan Venet, dalam Tarnoto, 2016). Kelebihan pendidikan inklusif

menurut hasil penelitian Sadioglu *et al* (2013) yaitu siswa dengan kebutuhan khusus menunjukkan perkembangan yang signifikan apabila dididik dalam satu lingkup kelas bersama siswa lain yang tidak mengalami kesulitan fungsional.

Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan implementasi pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan pada tahun 2012. Deklarasi dilaksanakan tanggal 24 September 2012 di kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah. Pada tahap awal dilaksanakan sebanyak 14 sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi, terdiri dari 12 sekolah dasar dan dua sekolah menengah pertama. Deklarasi ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Kab. Lombok Tengah no. 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kab. Lombok Tengah. Melalui deklarasi dan Peraturan bupati ini diharapkan pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Salah satu sekolah di Kab. Lombok Tengah yang melaksanakan pendidikan inklusif pada jenjang SD yaitu SDN Gunung Gatp Kec. Kopang. Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Gunung Gatep dimulai pada tahun 2016. Meskipun didaulat sebagai SD inklusif, belum banyak dukungan baik sumber daya guru maupun sarana dan prasarana yang ada diberikan kepada SDN Gunung

Gatep dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah melaksanakan pendidikan inklusif dengan berbagai upaya dan keterbatasan yang dimiliki.

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi menyatakan terdapat setidaknya delapan komponen yang wajib mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk *stakeholder* sekolah inklusif. Komponen-komponen tersebut yaitu: (1) siswa; (2) kurikulum; (3) tenaga pendidik; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian dan sertifikasi; (6) manajemen sekolah; (7) penghargaan dan saksi; dan (8) pemberdayaan masyarakat (Rombot, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah perlu adanya integrasi dan saling-keterdukungan antar seluruh komponen dan berbagai pihak. Adapun komponen dan pihak yang dimaksud yaitu sekolah seperti manajemen sekolah (kurikulum, sarana prasarana yang mendukung), guru, siswa, orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan latar belakang diatas, sebagai langkah awal khususnya di Kabupaten Lombok Tengah penting dilakukan pengkajian lebih mendalam apa saja kendala yang dialami guru SD sebagai salah ujung tombak dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Analisis kendala ini perlu dilakukan agar dapat dipetakan

bentuk kendala yang dialami serta bagaimana langkah untuk mengatasi dan menanggulangi. Analisis dilaksanakan dengan memotret kendala guru dalam: (1) perencanaan pembelajaran inklusif; (2) pelaksanaan pembelajaran inklusif; (3) evaluasi pembelajaran inklusif; dan (4) upaya guru dalam mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN Gunung Gatep, Kab. Lombok Tengah, NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (2010) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara menyeluruh dengan cara mendeskripsika kedalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya memotret dan mengamati yang terjadi di lapangan, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan deskriptif.

Lokasi penelitian di SDN Gunung Gatep, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Sumber data primer yaitu kepala sekolah, guru wali kelas I, kelas II, dan kelas III SDN Gunung Gatep karena pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Gunung Gatep difokuskan pada kelas I, II, dan III.

Data sekunder yaitu berbagai dokumen pendukung dari berbagai sumber tentang pendidikan inklusif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi, *interview*, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti tahapan: (1) koleksi data, (2) reduksi data, (3) presentasi data, dan (5) menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta studi dokumen pendukung seperti Profil Belajar Siswa, RPP, media pembelajaran, dan dokumen pendukung lain yang telah disusun oleh responden, peneliti menemukan beberapa kendala yang dialami guru dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN Gunung Gatep, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Adapun rincian kendala dibagi dalam beberapa aspek pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yaitu: (1) identifikasi dan asesmen awal; (2) perencanaan pembelajaran inklusif; (3) pelaksanaan pembelajaran inklusif; (4) evaluasi pembelajaran inklusif; dan (5) upaya guru dalam mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan inklusif.

Identifikasi dan Asesmen Awal

Sesuai hasil observasi dan wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa Identifikasi dan asesmen awal terhadap siswa dengan

dugaan mengalami kesulitan fungsional/kebutuhan khusus di SDN Gunung Gatep dilaksanakan secara mandiri oleh guru kelas. Hal ini dikarenakan SDN Gunung Gatep belum memiliki Guru Pendamping Khusus dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Teknik secara umum yang digunakan guru dalam identifikasi dan asesmen yaitu observasi dan tes sederhana. Sering kali observasi dilaksanakan bersama antara guru kelas 1, 2, dan 3 secara bergantian untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Instrumen yang digunakan guru dalam melakukan asesmen yaitu Profil Belajar Siswa (PBS). PBS merupakan instrumen pendataan siswa yang diduga memiliki kesulitan fungsional/kebutuhan khusus yang dikembangkan oleh tim Kemendikbud bekerja sama dengan Kedubes Australia melalui program Inovasi Indonesia serta TASS (Kemendikbud, 2019). PBS terdiri atas 9 komponen utama yaitu: (1) Identifikasi Ragam Disabilitas; (2) Alat Bantu Khusus; (3) Pergerakan di lingkungan sekolah; (4) Kelebihan atau Kemampuan; (5) Belajar dan Dukungan yang dibutuhkan; (6) Informasi Kesehatan, Diagnosa dan Pengobatan atau Penanganan; (7) Informasi Lain; (8) Kesimpulan Sementara; dan (9) Program Pembelajaran Individual (PPI).

Secara umum guru telah melaksanakan pendataan dengan PBS pada tiap kelas yang diampu yaitu

kelas I, II, dan III. Namun guru masih mengalami beberapa kendala dalam pengisian PBS. Pertama, guru merasa sedikit kesulita awalnya karena pengisian PBS merupakan hal yang baru. Selama ini identifikasi dan asesmen dilakukan hanya berdasar gejala yang nampak, tanpa ada alat bantu seperti PBS. Guru hanya berpatokan pada gejala umum dan fisik, serta pengalaman selama mengajar di jenjang sekolah dasar.

Kendala kedua yaitu pada pengisian identifikasi ragam disabilitas siswa dan penentuan alat bantu yang dibutuhkan oleh siswa. Kedua poin tersebut, menurut guru menjadi kendala karena guru belum begitu akrab dengan istilah-istilah yang disediakan. Bahasa yang digunakan dalam penentuan jenis cukup tinggi menurut guru, sehingga secara operasionalnya rumit dipahami oleh guru. Selain itu terdapat bias antara beberapa definisi jenis kesulitan fungsional/ disabilitas yang disediakan.

Data yang diperoleh juga sudah diolah guna menentukan dugaan awal terkait jenis kesulitan siswa beserta penangannya. Hanya saja, guru menyatakan bahwa data yang diperoleh belum dimanfaatkan dengan maksimal. Data-data hasil identifikasi dan asesmen masih sebatas hasil analisis guru dan hasil diskusi dengan teman sejawat. Guru belum yakin terhadap hasil penyimpulannya belum dikonsultasikan minimal dengan guru

GPK ataupun guru SLB/ psikolog. Hal ini sesuai dengan pasal 11 UU No. 70 Tahun 2009; Suparno, dkk (2007:6-7); Saputra (2016:11), Roza & Rifma (2020:64) yang menyatakan bahwa identifikasi dan asesmen dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara guru kelas dengan Guru Pendamping Khusus (GPK), guru mata pelajaran, psikolog, bahkan dokter spesialis serta orang tua untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan akurat.

Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri keberadaan guru kunjung dari PLB serta adanya Pusat Sumber Pendidikan inklusif telah dibentuk dan telah melaksanakan fungsi dalam implementasi pendidikan inklusif (Perbup No. 31 Kab. Lombok Tengah). Namun jangkauan dan area kerja yang cukup luas membuat tidak semua satuan pendidikan bisa terfasilitasi dengan maksimal.

Perencanaan Pembelajaran Inklusif

Pada tahap perencanaan, guru melakukan tindak lanjut serta keputusan hasil pengisian Profil Belajar Siswa (PBS). Keputusan dapat berupa penyusunan Program Pembelajaran Individual maupun penyesuaian Kurikulum. Berdasar hasil wawancara dengan guru kelas I-III dan kepala sekolah diperoleh gambaran bahwa di SDN Gunung Gatep melakukan tindak lanjut berupa adaptasi dan modifikasi kurikulum secara sederhana. Kepala sekolah belum membentuk tim penyesuaian kurikulum. Hal ini karena

SDN Gunung gatep belum memiliki GPK untuk membantu penyesuaian kurikulum. Setiap guru kelas lah yang melakukan adaptasi dan modifikasi kurikulum disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan fungsional/kebutuhan khusus yang dialami siswa.

Adaptasi kurikulum memiliki 3 dimensi yaitu adaptasi kurikuler, adaptasi pembelajaran, serta adaptasi lingkungan belajar (Janney & Snell, 2013). Pada tahap perencanaan ini, Guru di SDN Gunung Gatep melaksanakan adaptasi pada dimensi yang pertama yaitu adaptasi kurikuler. Adaptasi kurikuler terkait dengan penyesuaian tentang isi, materi atau kompetensi yang dipelajari oleh siswa.

Berdasar wawancara dan observasi di kelas, adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan guru berdasarkan hasil pengisian PBS yaitu penyederhanaan beberapa komponen dalam kurikulum. Penyederhanaan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Setiap penyesuaian tidak disamakan karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Komponen kurikulum yang disederhanakan belum secara menyeluruh, hanya sebagian besar dari RPP yaitu : (1) indikator dan tujuan pembelajaran; (2) materi pembelajaran; (3) strategi dan model pembelajaran; (4) media dan sumber belajar; (5) langkah pembelajaran; dan (6) evaluasi pembelajaran.

RPP yang diadaptasi oleh guru juga bukan RPP baru atau RPP khusus bagi siswa dengan kesulitan fungsional. RPP menjadi satu dengan siswa lain dengan sedikit penyesuaian pada beberapa komponen sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Hal ini sejalan dengan Junaidi (2015) dan Inovasi (2019) yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di kelas inklusif dibuat dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki siswa di kelas tersebut. Artinya guru cukup membuat satu RPP untuk satu kelas, akan tetapi di dalam RPP tersebut ada catatan-catatan khusus bagi bentuk penyesuaian yang diberlakukan bagi siswa berkebutuhan khusus.

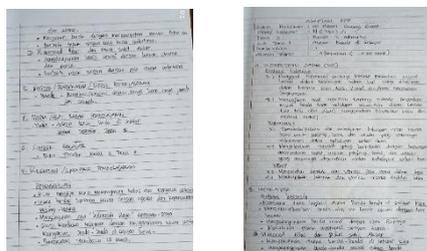
Kendala guru dalam penyesuaian kurikulum dan adaptasi pembelajaran yaitu kurangnya pengalaman dan pengetahuan guru. Guru mengatakan bahwa sebelumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan penyesuaian pembelajaran. Pengalaman guru juga terbatas dalam melakukan penyesuaian pembelajaran. Guru terbiasa menyusun RPP untuk siswa tanpa kesulitan fungsional sehingga tidak ada perubahan/adaptasi yang dilakukan.

Guru memang mengikuti pelatihan tentang implementasi kurikulum dari dinas terkait. Namun menurut penuturan guru, program tersebut telah berjalan lama namun belum ada tindak lanjut yang bersifat

paraktis dan pendampingan juga belum bersifat berkelanjutan. Guru menerima materi, melakukan workshop penyusunan perangkat pembelajaran yang ramah siswa berkebutuhan khusus, namun ketika tahap pelaksanaan riil di lapangan belum disertai dengan pendampingan dan pemberian umpan balik.

Kendala guru juga terkait hal teknis yaitu bagaimana menyesuaikan isi RPP mulai dari tujuan pembelajaran, indikator, materi, sumber dan media, pelaksanaan pembelajaran, serta pemberian evaluasi kepada siswa. Guru belum memahami penuh karakter setiap siswa dengan kesulitan fungsional sehingga sulit menetapkan indikator, tujuan, serta bentuk pembelajaran yang tepat dalam RPP. Mana bagian yang perlu disederhanakan, diturunkan, atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penentuan alokasi waktu juga menjadi kendala karena dalam penyesuaian RPP pada tahap langkah pembelajaran guru melakukan penyederhanaan di beberapa langkah guna mengakomodir kebutuhan siswa dengan kesulitan fungsional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurmaya & Aswat (2020) yang menyatakan bahwa masih banyak guru SD yang mengalami kesulitan dalam pengembangan RPP. Sedangkan menurut Tarnoto (2016), banyak guru SD menganggap bahwa penyusunan RPP berbasis inklusif merupakan kewajiban yang

menambah beban administrasi mereka. Hal ini menyebabkan banyak guru yang belum mengembangkan RPP inklusif di kelas mereka.



Gambar 1. RPP Adaptasi Guru

Kendala terakhir yang dihadapi guru yaitu kendala teknis. Selama ini dalam menyusun RPP guru kelas I, II, dan III dibantu oleh operator sekolah. Ketiga guru berdasar hasil observasi dan wawancara mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Laptop, sehingga dalam menyusun setiap RPP pada umumnya guru meminta bantuan operator sekolah. Pada saat melaksanakan adaptasi RPP ini, guru melakukannya dengan menulis tangan (gambar 1). Hasil tulisan tangan inilah yang kemudian diselipkan pada dokumen RPP yang sudah di print. Hal ini tentu kurang efisien dan menambah pekerjaan administrasi guru.

Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif

Saputra (2016) menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran bagi siswa pada sekolah inklusif dapat menerapkan sistem kelas *Pull Out*. Maksud dari sistem *Pull Out* yaitu selama siswa dengan kesulitan fungsional/ berkebutuhan Khusus dapat mengikuti pembelajaran di

dalam kelas reguler, maka siswa tersebut akan belajar bersama-sama dengan siswa regular lainnya. Apabila siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas reguler, maka siswa tersebut akan ditarik dari kelas reguler untuk belajar di dalam ruang belajar inklusi. Hal ini juga diterapkan di SDN Gunung Gatep.

Di kelas I, II, dan III SDN Gunung gatep, guru meingkutsertakan siswa dengan kesulitan fungsional/kebutuhan khusus dalam satu kelas bersama siswa lain. Mereka belajar dikelas yang sama dengan waktu dan porsi pembelajaran yang sama. Tidak ada pembedaan atau pemisahan kecuali keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan siswa dengan kesulitan fungsional/berkebutuhan Khusus tidak bisa belajar dikelas reguler.

Pelaksanaan pembelajaran inklusi di kelas I, II, dan III dilakukan dengan dimensi adaptasi intruksional. Adaptasi ini terkait cara, metode dan strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memfasilitasi siswa dengan kesulitan fungsional/berkebutuhan khusus dalam menguasai kompetensi atau materi yang ditargetkan (Janney & Snell, 2013; Inovasi, 2019). Beberapa adaptasi tersebut terlihat pada saat pembelajaran yaitu pemanfaatan metode *cooperative learning* dalam pembelajaran di kelas, pendampingan individual, memperpelan penjelasan materi dan instruksi, memberikan

waktu yang lebih kepada siswa dalam memahami dan mengerjakan tugas individu, pemanfaatan tutor sebaya, dan penggunaan media pembelajaran.

Berdasar wawancara dan hasil observasi, terdapat beberapa kendala guru pada saat melaksanakan adaptasi instruksioal. Kendala tersebut terkait: (1) kendala dalam menentukan alokasi waktu; (2) penerimaan siswa lain terhadap siswa ABK; (3) guru kesulitan membagi fokus ketika mengajar; dan (4) kendala pemanfaatan media pembelajaran.

Kendala pertama yaitu penyesuaian adaptasi dengan alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran yang tersedia. Karena belum terbiasa, seringkali guru mengalami kekurangan waktu pembelajaran. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa belum selesai, namun waktu pembelajaran telah usai. Kendala tersebut tidak disebabkan karena siswa yang berkesulitan fungsional, namun secara umum karena guru masih mencoba-coba teknis yang paling efektif. Sehingga guru melakukan penyesuaian yang ternyata berimbas pada molornya waktu siswa dalam kelas menyelesaikan tugas/kegiatan pembelajaran secara umum.

Kendala kedua terkait penerimaan siswa lain ketika dilaksanakan pembelajaran kelompok (*Cooperative learning*). Terkadang dalam pembagian kelompok, siswa

lain menolak untuk bekerjasama dengan siswa berkesulitan fungsional/kebutuhan khusus. Mereka menganggap siswa berkesulitan fungsional tidak akan berkontribusi dalam kelompok. Bahkan kecenderungan siswa masih memandang negatif terhadap siswa dengan kesulitan fungsional. Harus diberikan pengarahan dan pengawasan ekstra agar siswa lain mau menerima siswa berkesulitan fungsional dalam kelompok. Namun, disisi lain tidak sedikit siswa di kelas li dan III yang mau menerima bahkan mengajukan diri utnuk membantu teman yang berkesulitan fungsional.

Kendala ketiga yang terlihat saat obeservasi dan penuturan guru yaitu sulitnya guru membagi fokus. Karena baru melaksanakan pembelajaran inklusif, guru masih banyak berimprovisasi dalam hal fokus dan perhatian. Bahkan siswa lain merasa guru terlalu memberikan bimbingan kepada siswa yang berkesulitan fungsional. Ketika pembimbingan atau pengawasan individu, siswa lain merasa guru kurang memperhatikan mereka. Hanya siswa berkesulitan fungsional saja yang diawasi. Menurut guru, hal ini juga menjadi kendala tersendiri karena guru memerlukan waktu yang lebih untuk memperhatikan siswa lain tanpa mengabaikan siswa dengan kesulitan fungsional. Apalagi dikelas–kelas tertentu, siswa berkesulitan fungsional cepat merasa bosan, sehingga sering berkeliling dan

mengajak teman lain bermain sehingga harus diawasi dan diperhatikan. Hal inilah yang menjadi kendala pelaksanaan pembelajaran inklusif di kelas bagi guru.

Selain memastikan siswa di sekolah, guru juga mengupayakan pendampingan belajar siswa di rumah. Pendampingan dilakukan oleh orang tua atau saudara siswa yang ada di rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (3) Pergub Kab. Lombok Tengah yang menyatakan bahwa keluarga wajib memastikan setiap ABK yang ada dikeluarganya untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Namun pada pelaksanaannya, tidak terlaksana dengan maksimal. Kendala utama yang dihadapi yaitu sikap orang tua yang belum kooperatif dan terkesan kurang memperhatikan pola belajar siswa berkesulitan fungsional di rumah. Selain itu, banyak siswa dengan kesulitan fungsional tinggal dengan kakek dan nenek karena orang tuanya bekerja diluar daerah. Tentu hal ini menjadi kendala tersendiri dalam upaya penguatan belajar siswa di rumah.

Kendala keempat terkait dengan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru untuk memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbalis/lisan-tulisan saja. Media juga dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera dalam menjelaskan dan memahami materi (Sadiman, dkk, 2010). Dalam

pelaksanaan pembelajaran, guru sudah memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu siswa. Terutama media sederhana seperti sapu lidi, jam dinding, kerikil, dll. Namun guru mengaku masih kesulitan untuk menyediakan media lain, terutama ketika menyangkut media untuk materi yang kompleks. Selain itu, kendala lain adalah pengalaman dan keterampilan guru dalam memanfaatkan media yang ada. Di sekolah terdapat media berupa kartu kata dan huruf, media gambar, serta media-media lain yang disediakan oleh sekolah (gambar 2). Namun kebanyakan hanya dibiarkan saja, belum dimanfaatkan secara maksimal.



Gambar 2. Media yang Tersedia

Adaptasi kedua dalam lingkup pelaksanaan pembelajaran di kelas yaitu adaptasi ekologis atau lingkungan belajar. Adaptasi ini berkaitan dengan *setting* pembelajaran diselenggarakan, dimana, kapan dan bersama siapa pembelajaran diselenggarakan (Junaidi, 2015). Di SDN Gunung Gatep, guru melakukan adaptasi lingkungan dengan melakukan penataan tempat duduk dan meja. Penataan kelas dan tempat duduk berkaitan dengan aksesibilitas dan mobilitas siswa sesuai

dengan jenis kesulitan fungsional yang dialami siswa. Meja dan kursi ditata sedemikian sehingga memudahkan siswa berkesulitan fungsional khususnya dalam mengakses sumber, media, materi, dan keikutsertaan dalam pembelajaran.

Kendala yang dihadapi dalam penataan kelas berkaitan dengan sifat siswa di kelas rendah yang cepat bosan, memilih-milih teman, dan egoisme siswa masih tinggi. Guru mengutarakan bahwa siswa di kelas rendah masih suka memilih-milih teman. Seringkali meskipun sudah ditata dengan *rolling* dan rotasi, masih ada beberapa siswa yang menolak disandingkan dengan siswa berkesulitan fungsional. Guru harus meyakinkan dengan pendekatan ekstra dan pengertian ekstra agar siswa berpikiran terbuka.



Gambar 3. Meja dan kursi di kelas

Kendala kedua adalah bahan kursi dan meja yang terbuat dari kayu, menyulitkan saat dilakukan penataan/pemindahan (gambar 3). Apalagi siswa di kelas rendah, harus diperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan. Meja kursi yang berat akan menyulitkan siswa jika sering-sering dipindah. Selain itu ketika mendekati pekan UTS atau UAS

setting kelas harus dikembalikan ke bentuk awal yaitu berjajar dengan 2 siswa dalam satu bangku. Tentu ini memberatkan menurut guru. Alternatif yang dilakukan guru yaitu dengan membuat setting semi permanen, dimana yang dirotasi adalah siswanya bukan tempat duduknya. Setiap satu atau dua bulan sekali, siswa dirotasi sehingga tempat dan teman duduk mereka berganti.

Evaluasi dan Penentuan Ketuntasan Siswa

Aspek keempat yaitu kendala guru dalam melakukan evaluasi dan penentuan ketuntasan bagi siswa berkesulitan fungsional/ kebutuhan khusus. Penilaian merupakan bagian penting dan integral dalam pembelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data, penafsiran, analisis hasil sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan (Basuki & Hariyanto, 2016). Hasil evaluasi anak menentukan keputusan akhir yang diambil oleh guru, baik keputusan lulus-tidak maupun bentuk pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Adaptasi pada aspek evaluasi juga termasuk pada dimensi adaptasi instruksional (Janney & Snell, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, guru telah melaksanakan evaluasi dan menentukan ketuntasan siswa di kelas inklusif yang diajar. Evaluasi dan standar yang ditetapkan bagi

siswa berkesulitan fungsional/kebutuhan khusus dilakukan dengan acuan RPP yang dikembangkan. Dilakukan beberapa modifikasi seperti menurunkan standar penilaian dan ketuntasan, menabahi waktu pengerjaan, pemberian tugas khusus yang lebih sederhana. Dalam pelaporan, guru juga memaparkan pemberian nilai 80 bagi siswa lain berbeda standarnya dengan 80 yang diperoleh siswa berkesulitan fungsional/kebutuhan khusus.

Kendala yang dihadapi guru dalam kegiatan evaluasi pertama yaitu penentuan standar yang tepat, ketika guru memilih menyederhanakan atau menurunkan tingkat pencapaian siswa. Karena belum terbiasa, guru masih ragu-ragu apakah penyesuaian standar yang ditetapkan tepat atau tidak. Indikator penilaian disesuaikan dengan pengalaman guru dalam mengajar sebelumnya. Kadang bahkan guru memberikan soal yang sama, namun siswa dengan kesulitan fungsional diberi keleluasaan untuk mengerjakan soal mana yang dia bisa.

Kedua, pemilihan teknik evaluasi juga menjadi kendala guru. Dijelaskan diawal bahwa hasil wawancara menyatakan guru belum memahami sepenuhnya karakter siswa berkesulitan fungsional/kebutuhan khusus di kelasnya. Ini berimbas pada pemilihan teknik penilaian yang digunakan guru. Guru menuturkan bahwa teknik yang diambil adalah teknik yang paling

sederhana sesuai dengan pengalaman dan perkiraan guru.

Ketiga terkait dengan penilaian aspek sikap dan keterampilan. Disampaikan oleh guru bahwa sepenuhnya belum dapat melaksanakan penilaian sikap dan keterampilan terhadap siswa dengan kesulitan fungsional. Guru masih ragu, standar seperti apa dan seberapa tinggi ketika yang dinilai adalah sikap dan keterampilan. Terkait sikap dan keterampilan, dalam penilaiannya siswa diminta untuk menampilkan secara langsung. Namun siswa dengan kesulitan fungsional seringkali terkendala, sehingga sulit mengikuti terutama dalam aspek keterampilan. Yang dilakukan guru yaitu selama siswa mau berusaha dan menunjukkan sikap positif maka nilai mereka bagus. Jika belum mencapai akan diarahkan sesuai dengan yang mereka mampu lakukan.

Upaya Guru untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi

Meskipun beberapa kendala dihadapi guru di kelas I, II, dan III SDN Gunung Gatep terkait implementasi pendidikan inklusif, beliau bertiga dengan dukungan kepala sekolah juga melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Pertama, guru mengatasi keterbatasan yang dialami dengan mencari buku-buku rujukan pendukung tentang pendidikan inklusif. Buku yang dicari dalam bentuk fisik karena beliau mengalami

kendala dalam mengoperasikan komputer/laptop. Buku-buku ini juga diadakan oleh kepala sekolah sebagai bentuk dukungan meskipun jumlahnya baru 2-3 buku.

Kedua, cara yang dilakukan guru yaitu berdiskusi dengan teman guru dari SD lain yang telah melaksanakan pendidikan inklusif lebih dulu. Forum ini dilakukan secara pribadi baik dengan komunikasi langsung maupun komunikasi melalui daring. Guru-guru di SD lain diminta untuk membagikan pengalaman dan pengetahuannya selama menangani pelaksanaan pendidikan inklusif di SD mereka. Guru kelas I-III juga meminta masukan dan saran tentang kendala yang dihadapi di sekolah kepada guru-guru dari SD lain tersebut, sehingga diperoleh solusi dan pemecahan bersama.

Ketiga, guru aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan Penguatan Pendidikan Inklusif yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah, bekerjasama dengan beberapa instansi. Bentuk penguatan ini yaitu *workshop* penguatan pendidikan inklusif berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG). Dinas pendidikan bekerjasama dengan lembaga NGO (*Non Government Organisation*) dan LPTK sebagai narasumber kegiatan tersebut, dan guru kelas I-III SDN Gunung Gatep menghadiri sebagai peserta. Banyak materi yang diperoleh, dan juga pendampingan dalam pelaksanaan hasil *workshop* di sekolah. SDN

Gunung Gatep didampingi oleh 1 fasilitator, dan pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan. Guru antusias dan menyambut baik adanya pendampingan, karena memang pendampingan bersifat praktis dan langsung melihat kendala guru di sekolah. Guru menuturkan bahwa dengan pendampingan ini banyak solusi yang beliau dapatkan sendiri, karena fasda hanya mengarahkan. Gurulah yang menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Hal ini sesuai dengan hasil studi Affandi *et al* (2018) dimana melalui komunitas belajar profesional, guru SD bisa saling bertukar pengalaman, pendapat, informasi, serta pengetahuan yang terkait problematika yang beliau hadapi di kelas masing-masing. Melalui kegiatan diskusi, *sharing*, dan juga saling berbagi ini guru SD juga bisa mengembangkan berbagai inovasi, solusi, serta bentuk terbaik bagi pembelajaran di kelas yang di ajar.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar terdapat beberapa kendala yang dialami guru di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah. Adapun beberapa kendala yang dapat ditemukan yaitu: (1) kendala dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal siswa dengan kesulitan fungsional; (2) kendala dalam

merencanakan pembelajaran inklusif; (3) kendala dalam melaksanakan pembelajaran inklusif di kelas; dan (4) kendala dalam melaksanakan evaluasi dan penentuan tingkat pencapaian siswa.

Selain beberapa kendala tersebut, guru juga telah melakukan beberapa upaya mengatasi kendala yang dialami. Adapun upaya yang dilakukan guru yaitu: (1) mengadakan buku-buku sebagai referensi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah; (2) belajar dari guru sekolah lain yang telah melaksanakan pendidikan inklusif sebelumnya; dan (3) mengikuti *workshop* dan pendampingan penguatan pendidikan inklusif berbasis KKG yang diadakan oleh Dinas pendidikan Kab. Lombok Tengah.

Saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: (1) sekolah agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti PLB maupun psikolog guna memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah; (2) mengadakan buku sumber atau rujukan sebagai pegangan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif; (3) memperkuat kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk peningkatan pelaksanaan pendidikan inklusif; (4) pengadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di sekolah; dan (5) guru dapat memanfaatkan media dan sumber belajar yang tersedia dilingkungan sekitar guna

meminimalisir kendala ketersediaan media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, L.H., Ermiada, I., & Makki, M. 2018. Effective Professional Learning Community Model for Improving Elementary School Teachers' Performance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 326*, doi: <https://doi.org/10.2991/iccie-18.2019.54>.
- Basuki, I., dan Hariyanto. 2016. *Asesmen Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Inovasi. 2019. *Modul Penguatan Pendidikan Inklusif Berbasis Kelompok Kerja Guru*. Jakarta: Inovasi Indonesia.
- Janney, R., & Snell, M. E. 2013. *Modifying schoolwork: Teacherr's guide to inclusive practices*. Baltimore, MD: Paul H. Br.
- Junaidi, A.R. 2015. *Adaptasi Kurikulum: Rujukan Bagi Guru di Kelas Inklusif*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM. (online), (http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_624574942196.pdf), diakses pada 20 April 2020.
- Kemdikbud. 2019. *Instrumen Profil Belajar Siswa, (obline)*, (<http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/profil-belajar-siswa/>), diakses tanggal 12 April 2020.
- Kemendikbud. 2019. *Panduan Pendataan Siswa Penyandang*

- Disabilitas. (online) (<http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/?download=639>), diakses tanggal 15 April 2020.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2012. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmaya, A.L, & Aswat, H. 2020. Analisis Kendala Guru Sekolah Dasar di Kota Baubau Dalam Implementasi Kurikulum 2013. (JKPD) *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*. 5 (1), p.1-9.
- Peraturan Mendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Bupati Kab, Lombok Tengah No. 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kab. Lombok Tengah.
- Robot, O. 2017. *Pendidikan Inklusi*. (online), (<https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/>), diakses tanggal 15 April 2020.
- Roza, A. dan Rifma. 2020. Perencanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Majamen Sekolah Inklusif. (JKPD) *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*. 5 (1), p. 61-69.
- Sadiman, A., Rahardjo., Haryono, A., & Rahardjito. 2010. *Media Pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sadioglu, O. Batu, S. Bilgin, A dan Oksal, A. 2013. Problem, Expectations, and Suggestion of Elementary Teacher Regarding Inclusion. *Educational Science: Theory & Practice*. 13 (3), p. 1760-1765 DOI: 10.12738/estp.20133.1546
- Saputra, A. 2016. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif . *GOLDEN AGE Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. 1 (3), p. 1-13.
- Suparno., Purwanto, H., & Purwanto, E. 2007. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen DIKTI Depdiknas.
- Tarnoto, N. 2016. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD. *Humanitas*, 13 (1) p. 50-61. (online), (http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_626984286959.pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.